

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan)

FAHRUL ROZI NASUTION *

Sistim peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pidana persetubuhan

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Slw didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan sedangkan pertimbangan non-yuridis oleh hakim juga dibutuhkan oleh karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili perkara anak. .

Kata Kunci: *Restorative Justice* , Anak, Persetubuhan

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

INVESTIGATION PROCESS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE ON CHILDREN AS ACTORS OF CRIMINAL ACTIONS IN PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS (Study at the Medan Polrestabes Child Development Center Unit)

Fahrul Rozi Nasution *

The juvenile justice system has a specificity, whereby against children as a special legal study, it requires officials who are specifically authorized to carry out criminal justice processes against children who are in conflict with the law.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate restorative justice law in the process of investigating children as perpetrators of crimes, how to apply the principles of restorative justice in the process of investigating children as perpetrators of sexual intercourse, what are the obstacles investigators apply to the principles of restorative justice against children as perpetrators of crimes intercourse criminal intercourse

This type of research is research using a normative juridical approach. Data collection in this study was carried out through literature study, where the materials or data obtained would be arranged systematically and analyzed using qualitative scientific logic procedures.

The results of the research show that restorative justice law arrangements for children as perpetrators of violent crimes are regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges do not provide restorative justice by carrying out diversion against children who commit violent crimes as seen in the judge's decision where the judge only refers to the articles of implementation of diversion in Law Number 11 of 2012, PERMA Number 4 of 2014 and the Criminal Code. The application of restorative justice to the criminal act of intercourse committed by a child in decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Slw is based on juridical considerations, namely considerations based on factors revealed in court and by law stipulated as something that must be included in the decision while non-juridical considerations by the judge are also needed because of the problem of legal responsibility carried out by minors is not enough if it is only based on normative aspects, but the internal and external factors of the child which are the background of the child in committing Delinquency or crime must also be considered wisely by the judge who tries child cases.

Keywords: Restorative Justice, Children, Intercourse

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*